

WAJIB LAPOR LHKPN TAHUN 2024

No.	NAMA	JABATAN
1	Dr. NELVY CHRISTIN, S.H.,M.H	Ketua
2	SARJOKO, S.H.,M.H	Wakil Ketua
3	MOHAMMAD ZAHID, S.H.,M.H.	Panitera
4	BUDI SURYANA, S.H.	Sekretaris/KPA (Akhir menjabat)
5	RINI HARYANTI, S.H.	Panitera Muda Perkara
6	RR. TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.,M.Kn	Panitera Muda Hukum
7	Rr. ASNURI DWI MASTUTI, S.H.	KPA (Awal menjabat)
8	DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.	Hakim
9	FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.	Hakim
10	DELTA ARGA PRAYUDHA, S.H., M.H.	Hakim
11	CAHYETI RIYANI,SH	Hakim
12	ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.	Hakim
13	PRASETYO WIBOWO,SH,MH.	Hakim
14	VINARICHA SUCIKA WIBA, S.H.,M.H.	Hakim
15	RAHMAT SUSANTA, S.H.	Panitera Pengganti
16	SOPIAH, SH	Panitera Pengganti
17	GANJAR SUPARININGSIH, S.H.	Panitera Pengganti
18	RISANG ADE PUTRA, S.H.	Panitera Pengganti
19	ANDRIE WIBOWO, S.H.	Panitera Pengganti
20	RR.FEMY KRISNANINGTYAS, S.H.	Panitera Pengganti
21	IKA WAHYU NOVIANDARI POKKO, SE	PPK



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : NELVY CHRISTIN
NIK : 3273124412760002
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jabatan : KETUA
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 4 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NELVY CHRISTIN
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 88613

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.066.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 610 m2/48 m2 di KLATEN, WARISAN
Rp. 66.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/70 m2 di BANDUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 145.000.000

- MOBIL, CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ/ A/T Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 145.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 53.240.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 824.492.884

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.088.732.884

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.088.732.884

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : RETNO NAWANGSIH
NIK : 3311084803770004
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : KAMAR TATA USAHA NEGARA
Sub Unit Kerja : KAMAR TATA USAHA NEGARA
Jabatan : HAKIM YUSTISIAL/PANITERA PENGGANTI
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 6 Maret 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : KAMAR TATA USAHA NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RETNO NAWANGSIH**
2. Jabatan : **HAKIM YUSTISIAL/PANITERA PENGGANTI**
3. NHK : **81207**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.105.000.000**

1. Tanah Seluas 705 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/60 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, WARISAN Rp. 425.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/60 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, WARISAN Rp. 425.000.000
4. Tanah Seluas 2.846 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 405.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 312.500.000**

1. MOBIL, SUZUKI MINI BUS Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
3. MOBIL, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
5. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000



6. MOTOR, HONDA ADVENTURE TOURING 2 SEATER Tahun 2023,
HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

7. MOTOR, YAMAHA TURBO TECH MAX ULTIMATE Tahun 2024,
HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 106.350.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 267.658.149

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.791.508.149

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.791.508.149

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : MOHAMMAD ZAHID
NIK : 3402082002710002
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jabatan : PANITERA
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 7 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

I. DATA PRIBADI

- Nama : MOHAMMAD ZAHID
- Jabatan : PANITERA
- NHK : 468890

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 250.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 360 m²/110 m² di BANTUL, LAINNYA Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 195.000.000

- MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
- MOBIL, MAZDA CX 5 SUV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 460.000.000

III. HUTANG Rp. 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 360.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.MKN
NIK : 3471136309680002
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 6 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.MKN
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 457709

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.236.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/45 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 352.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 802.000.000		
3. Tanah Seluas 2.000 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 82.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	45.000.000
1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.282.500.000
III. HUTANG	Rp.	340.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	942.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : NIEKE ZULFAHANUM
NIK : 6371046306770005
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG
Jabatan : HAKIM
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 11 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

- Nama : NIEKE ZULFAHANUM
- Jabatan : HAKIM
- NHK : 112622

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 550.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/65 m² di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 330.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 45 m²/74 m² di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 211.000.000

- MOBIL, DAIHATSU SUV/ MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 54.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
- MOBIL, TOYOTA SIENTA MANUAL Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.900.000

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.250.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 10.500.000

Sub Total Rp. 809.650.000

III. HUTANG Rp. 398.800.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 410.850.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : DEDI WISUDAWAN GAMADI
NIK : 1871061512780003
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jabatan : HAKIM
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 22 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

- Nama : **DEDI WISUDAWAN GAMADI**
- Jabatan : **HAKIM**
- NHK : **477697**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	350.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m ² /45 m ² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	265.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	88.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	33.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	736.000.000
III. HUTANG	Rp.	430.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	306.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : ANITA LINDA SUGIARTO
NIK : 3374114407810005
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jabatan : HAKIM
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 10 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

- 1. Nama : ANITA LINDA SUGIARTO
- 2. Jabatan : HAKIM
- 3. NHK : 211400

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.150.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/39 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 75.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/140 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 220.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/93 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	485.000.000
1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA VOXY Tahun 2018, HIBAH TANPA AKTA Rp. 325.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	9.387.686



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.644.387.686
III. HUTANG	Rp.	225.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.419.387.686

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : FAJRI CITRA RESMANA
NIK : 1371090907840008
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jabatan : HAKIM
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 13 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

- Nama : FAJRI CITRA RESMANA
- Jabatan : HAKIM
- NHK : 213013

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.060.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000		
2. Tanah Seluas 189 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	---
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	34.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	94.122.283
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.188.122.283
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.188.122.283

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : RINI HARYANTI
NIK : 3174015401700002
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 15 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RINI HARYANTI
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA
3. NHK : 481567

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 8.119.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m²/190 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m²/190 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 147 m²/200 m² di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
4. Tanah Seluas 3873 m² di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. Tanah Seluas 2469 m² di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
6. Tanah Seluas 1782 m² di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
7. Tanah Seluas 3079 m² di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m²/190 m² di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m²/140 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
10. Tanah Seluas 1013 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
11. Tanah Seluas 3361 m² di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000



12. Tanah Seluas 3435 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
13. Tanah dan Bangunan Seluas 271 m2/400 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
14. Tanah dan Bangunan Seluas 403 m2/600 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 543.000.000

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 140.400.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 485.031.148

F. HARTA LAINNYA Rp. 370.733.000

Sub Total Rp. 9.658.164.148

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.658.164.148

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : ASLAMIA
NIK : 3404164310860001
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
BANJARMASIN
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
Jabatan : HAKIM
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 6 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASLAMIA
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 475283

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	132.000.000
1. Tanah Seluas 66 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 132.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	223.500.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000		
2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS R Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.200.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.935.860
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	363.635.860

III. HUTANG Rp. 560.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -196.364.140

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : DEWI YUSTITIANI
NIK : 3374104602820006
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
Jabatan : HAKIM
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 31 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEWI YUSTITIANI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 473584

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	296.900.000
1. MOBIL, HONDA MPNP/MINIBUS Tahun 2023, HIBAH TANPA AKTA Rp. 296.900.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	203.285.507
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	530.185.507
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	530.185.507

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : DELTA ARGA PRAYUDHA
NIK : 3402162705870003
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jabatan : HAKIM
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 13 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DELTA ARGA PRAYUDHA
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 552421

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/250 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 345.000.000

1. MOBIL, SUZUKI SWIFT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOBIL, MAZDA CX5 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 29.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 195.383.012

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.969.383.012

III. HUTANG Rp. 450.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.519.383.012



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : VINARICHA SUCIKA WIBA
NIK : 3573056504880004
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jabatan : HAKIM
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 7 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

- Nama : VINARICHA SUCIKA WIBA
- Jabatan : HAKIM
- NHK : 620817

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	250.000.000
1. Tanah Seluas 185 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	150.000.000
1. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	8.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	25.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	433.500.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	433.500.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : RR. ASNURI DWI MASTUTI
NIK : 3471124609710001
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Jenis Laporan : Khusus - Awal Menjabat
Tanggal Kirim : 16 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RR. ASNURI DWI MASTUTI
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 1018895

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.450.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m2/166 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000		
2. Tanah Seluas 1.030 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
3. Tanah Seluas 1.320 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	260.000.000
1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.715.000.000
III. HUTANG	Rp.	23.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.692.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : BUDI SURYANA
NIK : 3402081302670001
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jabatan : SEKRETARIS
Jenis Laporan : Khusus - Akhir Menjabat
Tanggal Kirim : 16 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BUDI SURYANA
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 836368

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	333.500.000
1. MOTOR, HONDA VARIO E1F02N11M2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000		
2. MOTOR, HONDA SCOPY FIC02N28L0 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000		
3. MOTOR, HONDA BEAT H1B02N42LO A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000		
4. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINI BUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 296.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.800.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	337.300.000
III. HUTANG	Rp.	113.160.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	224.140.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : RAHMAT SUSANTA
NIK : 3471142607710003
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 10 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAHMAT SUSANTA
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 753176

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	300.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 74 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	26.800.000
1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
2. MOTOR, HONDA LEGENDA SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000		
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.350.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	330.650.000
III. HUTANG	Rp.	241.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	89.650.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : RISANG ADE PUTRA
NIK : 3671011111790003
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 13 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : RISANG ADE PUTRA
- Jabatan** : PANITERA PENGGANTI
- NHK** : 842635

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	56.000.000
1. MOTOR, YAMAHA 2SX / SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
2. MOBIL, SUZUKI KARIMUN SL 410R / MINIBUS Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	38.890.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	20.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	114.890.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	114.890.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : GANJAR SUPARININGSIH
NIK : 3515136804660002
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 13 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : GANJAR SUPARININGSIH
- Jabatan** : PANITERA PENGGANTI
- NHK** : 767026

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	350.000.000
1. Tanah Seluas 609 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN	Rp.	
350.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	21.000.000
1. MOTOR, HONDA X1HO2N35M1 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	
Rp. 9.000.000		
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	
12.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	375.200.000
III. HUTANG	Rp.	78.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	297.200.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : ANDRIE WIBOWO
NIK : 3471131810840004
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 2 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

- Nama : **ANDRIE WIBOWO**
- Jabatan : **PANITERA PENGGANTI**
- NHK : **884495**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	180.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 56 m2/49 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	9.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	5.900.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.700.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	197.600.000
III. HUTANG	Rp.	170.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	27.600.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : FEMY KRISNANINGTYAS
NIK : 3311106402860004
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 6 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

- Nama : FEMY KRISNANINGTYAS
- Jabatan : PANITERA PENGGANTI
- NHK : 887512

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	4.500.000
1. MOTOR, HONDA REVO/NF 100TD Tahun 2008, LAINNYA	Rp.	4.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	13.350.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	22.850.000
III. HUTANG	Rp.	315.790.633
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-292.940.633

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : IKA WAHYU NOVIANDARI POKKO
NIK : 9171055011870004
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 13 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : IKA WAHYU NOVIANDARI POKKO
- Jabatan** : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
- NHK** : 905034

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	350.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 58 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	109.000.000
1. MOBIL, TOYOTA YARISH TIPE J Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 99.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	18.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	11.600.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	488.600.000
III. HUTANG	Rp.	430.642.500
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	57.957.500

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.